

Pengalaman Komunikasi Pemerintah Kota Padang Dalam Penanggulangan Masalah Prostitusi Terselubung di Kota Padang

Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ PT Perkebunan Nusantara II

Atika¹⁾, Elva Ronaning Roem²⁾, Sarmiati³⁾, Najmuddin Rasul⁴⁾

- 1) Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ PT Perkebunan Nusantara II, E-mail: atikapopping@gmail.com
- 2) Ilmu Komunikasi/ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, E-mail: elvarona@soc.unand.ac.id
- 3) Ilmu Komunikasi/ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, E-mail: mia.unand@gmail.com
- 4) Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, E-mail: najmuddin@fhuk.unand.ac.id

ARTICLE INFORMATION

KEYWORDS:

Pengalaman Komunikasi, Prostitusi Terselubung, Pemerintah Kota Padang, Penanggulangan.

CORRESPONDENCE

Phone: +62 822-8392-9011

E-mail: atikapopping@gmail.com

A B S T R A C T

Isu tentang prostitusi menjadi topik yang hangat diperbincangkan, karena keberadaannya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Prostitusi terselubung di Kota Padang masih menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang melakukan penanggulangan sebagai bentuk penegak dari Peraturan Daerah. Komunikasi pemerintah didefinisikan sebagai bentuk penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Peneliti melihat bagaimana pengalaman komunikasi Pemerintah Kota Padang dalam menanggulangi Prostitusi terselubung di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis yang dikemukakan oleh Edmund Husserl. Penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl. Pemerintah Kota Padang melalui beberapa OPD (Satpol PP, Dinas Sosial, DP3AP2KB), sudah melakukan upaya penanggulangan prostitusi terselubung. Upayanya seperti melakukan penangkapan dan razia rutin pada lokasi penginapan dan panti pijit. Pelaku yang terlibat prostitusi akan langsung dikirim ke panti rehabilitasi Andam Dewi. Selain itu juga melakukan sosialisasi dengan bentuk komunikasi langsung pada tingkat kelurahan di Kota Padang. Pengalaman komunikasi Pemerintah Kota Padang telah berupaya melakukan penanggulangan prostitusi terselubung. upaya penanggulangan yang sosialisasi, razia rutin, pengiriman ke panti rehabilitasi, dan komunikasi secara informal melalui psikolog.

INTRODUCTION

Prostitusi di kalangan masyarakat merupakan suatu bentuk penyakit masyarakat. Masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan prostitusi terus berkembang. Prostitusi merupakan masalah sosial tertua yang dikenal oleh masyarakat, dan sangat erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi. Transaksi yang melibatkan seksualitas memang sudah lama menjadi sebuah komoditas yang diperjual belikan oleh masyarakat sejak masa penjajahan, transaksi jual beli perempuan di Indonesia terus

menerus terjadi (Prakoso, 2016). Istilah prostitusi dianggap mengandung makna yang negatif. Di Indonesia, para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Sebutan tersebut menandakan bahwa perempuan pelaku prostitusi tidak memiliki moral karena melakukan pekerjaan yang melanggar norma dan nilai kesusilaan dalam masyarakat (Roem, 2014).

Isu tentang prostitusi menjadi topik yang hangat diperbincangkan, karena keberadaannya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

Pihak yang kontra menilai bahwa prostitusi memiliki implikasi terhadap pengaruh moral dan nilai-nilai sosial lainnya, namun pada pihak pro menilai bahwa prostitusi mampu memberikan pemasukan ekonomi bagi para pelibat kegiatan tersebut (Sugiyono,dkk 2015). Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu gejala sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia selain faktor ekonomi. Hal yang mendorong terjadinya transaksi prostitusi yakni pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan dengan bio-psikologi, khususnya nafsu seksual manusia antara pria dan wanita. Dorongan luar lainnya meliputi aspek sosial, ekonomi, kebudayaan sahingga prostitusi masih berlangsung hingga saat ini.

Pergeseran nilai-nilai sosial saat ini sudah mengalami pergeseran yang dahulu dianggap sakral dan sekarang sudah menjadi suatu hal yang wajar bagi sebagian orang, seperti halnya sex pra nikah, pergaulan bebas, dan kehidupan malam. Sikap acuh tak acuh dari masyarakat timbul dan tidak peduli akan adanya penyimpangan sosial tersebut.

Mengingat begitu banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari penyakit masyarakat. Keberadaan transaksi seks di Kota Padang, mendapat perhatian oleh pemerintah setempat dengan lahirnya perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang ketertiban Umum dan Kententrman Masyarakat. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 10 ayat 2 : *“Setiap Orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur atau berupaya mengadakan transaksi seks”*. Tetapi transaksi seks masih banyak ditemui, praktik yang terjadi dalam bentuk prostitusi terselubung, karena belum adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang mengizinkan untuk membuka lokasi prostitusi dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang ketertiban Umum dan Kententrman Masyarakat, karena dinilai kegiatan ilegal tersebut merupakan tindakan yang tidak akan pernah sesuai dengan filosofi masyarakat Minangkabau yakni *“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*.

Kasus prostitusi yang ada di Kota Padang hingga saat ini masih ada dan dengan mudah

ditemui, meskipun kehadiran lokalisasi di Kota Padang secara sosial dan budaya bertentangan dengan nilai agama dan adat Minangkabau yang sangat keras menentang penyakit masyarakat ini. Hasil dari observasi awal peneliti menemukan bahwa kegiatan prostitusi dan transaksi yang dahulunya dilakukan dengan cara tatap muka langsung, lain halnya untuk zaman sekarang. Praktik prostitusi online dengan menggunakan aplikasi Michat mulai mewabah ditengah kemajuan teknologi. Pengguna dengan mudahnya melakukan negosiasi harga dan lokasi dengan para PSK melalui fitur *chat* dan *people nearby*.

Data yang dihimpun dalam waktu dua bulan pada akhir tahun 2019 setidaknya sudah ada dua kasus prostitusi di Kota Padang yang terkuak ke publik. Prostitusi terselubung juga berhasil terkuak oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polresta Kota Padang. Kasus yang pertama terjadi pada tahun 2020 tertangkapnya anak dibawah umur yang dijajakan oleh seorang mucikari melalui aplikasi Michat. Kejadian ini seakan membuka bahwa transaksi seks semakin hari semakin marak di Kota Padang. Kasus yang mencuak ke publik yaitu prostitusi yang berkedok indekost di Jalan Adinegoro, Kelurahan Lubuk Buaya ¹. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pendamping sosial di Dinas Sosial Kota Padang, bahwasannya pada tahun 2020 Unit Pelayanan Program Kesejahteraan Sosial Anak sudah mendampingi terhadap sebelas orang anak dibawah umur yang terjerat kasus prostitusi. Anak dibawah umur ini tertangkap oleh polisi disalah satu hotel berbintang di Kota Padang.

Komunikasi pemerintah didefinisikan sebagai bentuk penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama (Hasan, 2005:95). Melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat akan memberikan manfaat positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara terminologi komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian suatu pernyataan atau pesan oleh

¹ Lihat <https://www.metroandalas.co.id/berita-padang-darurat-prostitusi-dari-kedok-koskasan-hingga-michat.html> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020

sumber kepada penerima baik secara verbal maupun *non* verbal yang dapat menimbulkan suatu makna tertentu dan dipahami dengan baik oleh komunikator atau komunikan melalui saluran tertentu. Kualitas suatu pemerintahan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis yang dikemukakan oleh Edmund Husserl (1859-1938). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dan tingkah laku dari manusia, bukan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2008: 14).

Paradigma penelitian memberikan sebuah penjelasan tentang apa yang hendak peneliti lakukan, dan apa saja yang masuk kedalam maupun di luar batas suatu penelitian yang benar (Denzim & Lincoln, 2009: 132-133). informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti informan menguasai informasi penelitian.

Informan dalam rancangan penelitian ini adalah bagian beberapa instansi dari Pemerintahan Kota Padang dan penanganan kasus prostitusi, Satpol PP Kota Padang dan Dinas Sosial Kota Padang. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Padang dengan kriteria sebagai berikut :

1. ASN yang bertugas di Pemerintah Kota Padang yang mencegah dan menanggulangi permasalahan prostitusi di Kota Padang.
2. Pernah melakukan penangkapan dan penanggulangan prostitusi di lingkup administrasi Kota Padang.
3. Pegawai Dinas Sosial Kota Padang dan pegawai Satpol PP Kota Padang yang memiliki pengalaman dalam penanggulangan prostitusi terselubung.

Awalnya peneliti melakukan pengumpulan data mulai dari proses awal hingga menghasilkan pembahasan penelitian. Pada

penelitian ini peneliti akan menggunakan Teknik wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi dan dokumentasi. peneliti menggunakan teknik analisis fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl. Dalam Kuswarno (2009:39-53) menyebutkan bahwa teniknya terbagi atas

1. Reduksi Fenomenologis
2. Reduksi Eudetik
3. Reduksi Transendental

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan validasi data penelitian kualitatif. Salah satunya adalah mengklarifikasi bias peneliti atau refleksivitas (*reflexivity*).

RESULTS AND DISCUSSION

Peneliti mendapatkan hasil penelitian melalui wawancara bersama enam informan penelitian yang sudah sesuai dengan kriteria dari peneliti. Informan terdiri dari ASN yang bertugas di OPD Pemerintahan Kota Padang. Informan yang berusia 48-60 tahun. Peneliti juga melakukan observasi pada pengalaman yang dilihat oleh informan terhadap Komunikasi Pemerintah Kota Padang dalam menanggulangi prostitusi di Kota Padang.

Hasil penelitian ini adalah uraian mengenai pendapat terhadap pengalaman komunikasi Pemerintah Kota Padang dalam menanggulangi prostitusi di Kota Padang.

1. Pengalaman Komunikasi Pemerintah Kota Padang dalam Menegakkan Perda Trantibum

Pengalaman komunikasi pemerintah Kota Padang dalam upaya untuk penanggulangan prostitusi, merupakan penelitian yang telah peneliti kaji. Peneliti mengamati dan melakukan wawancara mendalam kepada beberapa instansi Satpol PP Kota Padang, Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, DP3AP2KB, dan bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Padang.

Kota Padang memiliki aturan tertulis yang mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat yakni Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Pada Perda tersebut sudah dijelaskan pada BAB VII Pasal 10 tentang tuna sosial yang berbunyi.

“Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks”

Berdasarkan dari Peraturan Daerah Kota Padang, terkhususnya dalam penanggulangan perbuatan seks bebas dan prostitusi terselubung yang dilarang oleh norma hukum dan agama. Pemerintah Kota Padang, melalui Walikota pada tahun 2018 yakni Bapak Mahyeldi mendeklarasikan ‘Padang Bebas Maksiat’. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan 2.

Adanya deklarasi yang disampaikan oleh Walikota Padang pada periode tahun 2019 – 2021, menjadi salah satu bentuk penyampaian informasi dan pesan kepada masyarakat Kota Padang untuk menghindari penyakit masyarakat terutama pada prostitusi terselubung. Hasil temuan peneliti ini menjelaskan definisi komunikasi yang disampaikan oleh Onong Uchjana Effendy, yang menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada oranglain guna memberi tahu ataupun mengubah sikap, pendapat maupun perilaku dan pesan tersebut disampaikan baik secara lisan maupun tidak langsung seperti melalui media (Effendy, 2011:5)

Melalui rujukan tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengalaman komunikasi berkaitan dengan sesuatu yang dialami individu dan berkaitan dengan aspek komunikasi, meliputi proses, symbol maupun makna yang dihasilkan, serta dorongannya pada tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti telah mengemati pengalaman-pengalam komunikasi yang dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Padang yang dapat dijadikan acuan bagi OPD yang menjalankan Perda Trantibum dan kesejahteraan rakyat.

2. Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Menanggulangi Kasus Prostitusi Terselubung.

Pemerintah Kota Padang untuk mewujudkan Kota Padang yang bebas dari

maksiat dan penyakit masyarakat, yakni salah satunya dengan menegakkan Trantibum. Pemerintah Kota Padang telah berusaha mengedukasi masyarakat tentang perilaku yang bertentangan dengan norma. Seperti yang dikemukakan oleh informan 3 (EW) Pada 20 Juli 2022 sebagai berikut,

“Prostitusi terselubung ini memang menjadi satu fenomena yang harus kita antisipasi bersama, dan itu diakui juga bahwa itu ada, dan diakui juga bahwa itu belum bisa diatasi. Makanya kami fokusnya memang pada pencegahan, edukasi, caranya kita dengan memperbanyak sosialisasi. Jadi tim kami melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Padang, itu melakukan sosialisasi ke masjid, kesekolah sekolah, melalui virtual zoom.

Praktik prostitusi terselubung masih menjadi salah satu fenomena yang sulit untuk dihilangkan, tetapi bisa dilakukan penanggulangan atau langkah pencegahan. Pemerintah Kota Padang melalui OPD DP3AP2KB sudah melakukan upaya penanggulungan. Penanggulungan yang sudah dilakukan yakni berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat di kelurahan melalui PUSPAGA.

3. Satpol PP Menerapkan Razia Rutin dan Kegiatan Initilgen Sebagai Upaya Penanggulungan Prostitusi Terselubung

Selain upaya sosialisasi dan penambahan pengetahuan kepada masyarakat perihal bahayanya prostitusi terselubung OPD Pemerintah Kota Padang (Satpol PP) memiliki beberapa program sebagai penunjang penerapan Perda Trantibum menjaga keamanan Kota Padang.

“Kami punya program yang sudah rutin kami laksanakan, yakni patrol, kami juga ada kegiatan initaligen, kami juga ada kegiatan mendengarkan dan menerima laporan dari masyarakat. Laporan tersebut kami lakukan

penyelidikan dan jika terbukti benar melalui memata matai sendiri melalui aplikasi Michat kami akan melakukan tindakan.”

Kegiatan patroli sebagai bentuk upaya preventif yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, karena dengan adanya penangkapan dari kegiatan razia rutin akan membuat efek jera bagi pelaku prostitusi terselubung. Kedepannya diharapkan pelaku dari prostitusi tidak melakukan hal yang sama lagi.

4. Hambatan Komunikasi Pemerintah Kota Padang Dalam Melakukan Penanggulangan Prostitusi Terselubung.

Dalam proses komunikasi, dapat ditemui hambatan-hambatan yang mengganggu proses penyampaian pesan komunikasi, sehingga komunikator dan komunikan tidak memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Effendy (2007, 4) menyatakan bahwa komunikasi dapat terhambat karena adanya unsur kepentingan, motivasi dan prasangka.

Hambatan yang terjadi Dalam pengalaman komunikasi Pemerintah Kota Padang Dalam melakukan Penanggulangan Prostitusi Terselubung yakni, perbedaan pendapat dan pemahaman terhadap porsi kerja dari masing masing OPD yang ada dipemerintahan Kota Padang. Hambatan Hambatan lainnya yakni adanya pembatasan yang disengaja pada komunikasi yang berakitan dengan sensor dilakukan oleh pemerintah terhadap pengiriman dan penerimaan pesan. Hambatan dan tantangan Pemerintah Kota Padang Dalam upaya penanggulangan prostitusi ini kurangnya pengawasan keluarga terutama pada peran ninik mamak Dalam Minangkabau yang berfungsi untuk menjaga kemandirian dengan baik. Hambatan yang terjadi lainnya, yakni kurangnya media komunikasi yang dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan penyakit masyarakat, terkhusus pada prostitusi terselubung.

CONCLUSIONS

Pemerintah Kota Padang melalui beberapa OPD (Satpol PP, Dinas Sosial, DP3AP2KB), sudah melakukan upaya penanggulangan

prostitusi terselubung. Upayanya seperti melakukan penangkapan dan razia rutin pada lokasi penginapan dan panti pijit. Pelaku yang terlibat prostitusi akan langsung dikirim ke panti rehabilitasi Andam Dewi. Selain itu juga melakukan sosialisasi dengan bentuk komunikasi langsung pada tingkat kelurahan di Kota Padang. Pengalaman komunikasi Pemerintah Kota Padang telah berupaya melakukan penanggulangan prostitusi terselubung. upaya penanggulangan yang sosialisasi, razia rutin, pengiriman ke panti rehabilitasi, dan komunikasi secara informal melalui psikolog.

Dukungan elemen masyarakat, polri, dan terutama pada lingkup keluarga. Peran ninik mamak sebagai tokoh Tigo Tungku Sajarangan dalam Minangkabau berfungsi untuk menjaga anak dan kemenakannya agar tidak masuk pada kegiatan yang melanggar norma hukum dan agama seperti prostitusi terselubung.

REFERENCES

- Abidin, Yusuf Zainal. 2016. *Komunikasi Pemerintahan (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adian, D.G. 2010. *Pengantar Fenomenologi*. (cet.1). Depok: Koekoesan.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Artosa, Odam Asdi. 2018. *Pekerja Migran dan Ekonomi Informasi Ilegal (prostitus di Wilayah Pasar Kembang)*, Yogyakarta. Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 5 No.1.
- Bungin, Burhan. 2007. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- 2012. *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajarafindo Persada.
- Butje Tampi. *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010, hlm. 56
- Creswell, Jhon w. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Penelitian Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. (Ed. 3). (Ahmad

- Lintang Lazuardi, Trans). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzim, Norman K & Yvonna S Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DeVito, Joseph A. 2013. *The Interpersonal Communication Book 13th Edition*. United States of America: Pearson Education, Inc.
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Effendy, Onong Uchjana. 2011. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Effendy, Onong Uchjana, 2007. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fiske, Jhon. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Ketiga*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Hasan, Erliana. (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung :Refika Aditama
- Hikmalia, Wilda. Hafied Cangara. Umaimah Wahid. 2021. *Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Perempuan di Media Online*. Jurnal Ranah Komunikasi Vol 05 Nomor 01.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana Deddy. 2012. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mia Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab, hlm 863
- Sedarmayanti. 2018. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika
- Sugiyono, Inayah, N., Biati, L., Andriani, Z.Z.D., Nasrullah, M.A., 2015. "Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi di Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Tentang Faktor Penyebab Mantan PSK Kembali Bekerja Di Lokalisasi Turian Purwoharjo Banyuwangi". Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol. 1, No.1, Hlm. 1–16
- Rakhmat, Jalaluddin. 2008. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Roem, Elva Ronaning & Atwar Bajari. *Model Komunikasi Wisata "Terselubung" Pelacuran Ilegal di Kota Padang*. Bunga Rampai Komunikasi Indonesia
- Roem, Elva Ronaning. Sarmiati & Ghina Novarisa. 2020. *Model Komunikasi Da'I Dalam Pembinaan Rohani Pada Mantan Pekerja Seks Komersial Di Kota Padang*. Jurnal Ranah Komunikasi Vol 04 Nomor 01
- Ruliana, P. 2014. *Komunikasi Organisasi: Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Vardiansyah, Dani. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Books with an author:*
- Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Books with an editor:*
- Sulistiyowati Irianto (ed). (2009). *Hukum Yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Journal articles:*
- Aarne Poisto & Hamed Alavi (2016). Abuse of Dominant Market Position by Predatory Pricing; The Valio Case. *Hasanuddin Law Review*, 2(1), 24-37. DOI: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212>
- World Wide Web:*
- British Broadcasting Corporation. (2012). *Noken Papua Mendapat Pengakuan UNESCO*. Available online from: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121205_noken_unesco. [Accessed May 16, 2015].